



## PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA DIDESA GADOBANGKONG KABUPATEN BANDUNG BARAT

Tri Pamungkas Nugroho<sup>1)</sup>, Yamardi<sup>2)</sup>, Titin Rohayatin<sup>3)</sup>

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

### Abstrak

Penelitian berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Perekonomian melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Gadobangkong Kabupaten Bandung Barat”. Fenomena masalah adalah kurangnya peran Pemerintah Desa dalam perencanaan pelaksanaan program BUMDes dalam pembangunan perekonomian di Desa Gadobangkong. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Pemerintah Desa dalam pembangunan perekonomian melalui BUMDes serta faktor penghambat dan pendukung di dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gadobangkong. Teori yang digunakan adalah teori peran menurut Pitana & Gayatri (2005:96, motivator, fasilitator dan dinamisator). Metode penelitian melalui pendekatan kualitatif penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan data. Informan yakni Kepala Desa Gadobangkong, Kepala Seksi Pemerintahan Desa Gadobangkong, Badan Permusyawaratan Desa, BUMDes, dan Tokoh Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Desa Gadobangkong melalui dimensi motivator dalam memberikan ide dan gagasan sebagai bentuk motivasi kepada BUMDes belum dilaksanakan secara maksimal. Dimensi fasilitator ialah kurangnya dalam memberikan fasilitas sarana prasarana secara maksimal dalam pelaksanaan BUMDes, dan dimensi dinamisator yakni belum terwujudnya sinergitas dalam pembangunan perekonomian yang kuat. Upaya yang dilakukan terfokus terkait pembangunan perekonomian melalui BUMDes yang di kelola secara bersama-sama baik di kelola oleh Pemerintah Desa maupun masyarakat sebagai pelaksana.

**Kata Kunci:** Peran Pemerintah Desa, Pembangunan Perekonomian, BUMDes

### Abstract

*The research is entitled "The Role of Village Government in Economic Development through Village-Owned Enterprises in Gadobangkong Village, West Bandung Regency". The phenomenon of the problem is the lack of role of the Village Government in planning the implementation of the BUMDes program in economic development in Gadobangkong Village. This study*

*aims to describe and analyze the role of the Village Government in economic development through BUMDes as well as the inhibiting and supporting factors in the Gadobangkong Village-Owned Enterprises (BUMDes). The theory used is the role theory according to Pitana & Gayatri (2005: 96, motivator, facilitator and dynamizer). The research method is through a qualitative approach of descriptive research. Data collection techniques through literature studies and field studies. Data analysis techniques through data reduction, data presentation and drawing data conclusions. Informants are the Head of Gadobangkong Village, Head of Gadobangkong Village Government Section, Village Consultative Body, BUMDes, and Community Leaders. The results showed that the Gadobangkong Village Government through the motivator dimension in providing ideas and ideas as a form of motivation to BUMDes has not been implemented optimally. The facilitator dimension is the lack of providing maximum infrastructure facilities in the implementation of BUMDes, and the dynamizer dimension is the lack of synergy in strong economic development. Efforts made are focused on economic development through BUMDes which are managed jointly by both the Village Government and the community as implementers.*

**Keywords:** *Role of Village Government; Economic Development; BUMDes*

## **PENDAHULUAN**

Pada dasarnya pembangunan perekonomian adalah orientasi dalam proses melakukan program untuk memajukan bangsa, termasuk proses perwujudan cita-cita suatu negara untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Salah satunya yaitu pembangunan Desa yang harus dilakukan secara berencana dan menyentuh kebutuhan masyarakat Desa. Oleh karena itu, pembangunan Desa harus didasarkan pada potensi dan kelemahan Desa. Untuk mewujudkan pembangunan Desa tersebut, dibutuhkan peran Pemerintah Desa, hal ini dikarenakan Pemerintah Desa yang lebih mengetahui permasalahan dan potensi Desa.

BUMDes dikatakan sebagai lembaga sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat desa melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat. BUMDes sebagai lembaga komersial bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal yang dimiliki baik berupa barang maupun jasa. Kebijakan tentang BUMDes di Kabupaten Bandung Barat diatur dalam Peraturan Daerah Nomor

7 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Daerah inilah yang menjadi acuan BUMDes yang ada di seluruh Desa di Kabupaten Bandung Barat, termasuk BUMDes di Desa Gadobangkong. Dengan didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan dapat menjadi penggerak roda perekonomian dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Menurut data dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bandung Barat, BUMDes di Kabupaten Bandung Barat kini sudah berdiri sebanyak 165 BUMDes. Namun yang beroperasi dan memberikan pemasukan bagi pendapatan asli Desa hanya bisnis usaha perantaran jasa pelayanan pada masyarakat, yakni penyewaan lapak untuk UMKM pada kegiatan Pasar Desa. Hal ini dikarenakan kurangnya minat masyarakat dalam mengelola dan konsep BUMDes yang kurang jelas sehingga dalam menjalankan BUMDes belum maksimal dan bahkan lebih memilih bekerja di usaha lain.

Dengan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa Gadobangkong berharap dapat meningkatkan kemandirian Desa serta dapat memberdayakan ekonomi masyarakat melalui unit usaha yang dijalankan, dengan begitu Pemerintah Desa selaku pendiri dan pengurus BUMDes harus mampu dalam mengajak masyarakat untuk aktif dan berpartisipasi dalam pengurusan dan mengelola BUMDes WARAGAD dengan begitu pembangunan perekonomian yang ditujukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan perekonomian masyarakat akan tercapai. Pada penelitian ini, Teori yang digunakan adalah teori peran menurut Pitana & Gayatri (2005:96, motivator, fasilitator dan dinamisator).

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian deskriptif ini digunakan untuk menganalisis permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti yaitu belum berperannya Pemerintah Desa dalam pembangunan

perekenonomian di Desa Gadobangkong guna meminimalisir angka kemiskinan yang ada di Desa Gadobangkong melalui unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Peneliti akan mendeskripsikan peran Pemerintah Desa dalam pembangunan perekonomian melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Gadobangkong. Penelitian ini menggunakan pendekatan pemerintah berupa peran yang dilakukan dalam mengkaji suatu pembangunan dalam bidang perekonomian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) konsep peran Pemerintah Daerah menurut Gayatri (2005:96) yaitu peran sebagai motivator, fasilitator dan dinamisator.

Pada penelitian ini, peneliti selaku instrumen penelitian. Hal ini berangkat dari karakteristik sebuah penelitian kualitatif yaitu tidak ada cara lain selain menggunakan penelitian sebagai instrumen penelitian. Peneliti melakukan proses penelitian secara langsung seperti menentukan fokus penelitian, memilih informan, melakukan pengumpulan data, dari berbagai sumber, mengolah data sehingga mengambil kesimpulan sebagai hasil dari penelitian. Berikut dengan hal tersebut, maka peneliti menentukan unit analisis dalam penelitian ini adalah Kantor Desa Gadobangkong dan Sekertariat Badan Usaha Milik Desa Gadobangkong.

Berdasarkan pada hal tersebut, informan yang peneliti pilih sebagai sumber informasi adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa Gadobangkong, Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Tokoh Masyarakat. Teknik pengumpulan Data dalam penelitian ini menggunakan 2 cara yaitu: Studi Pustaka dan Studi Lapangan. Analisis data yang digunakan peneliti yaitu menggunakan teknis analisis data seperti berikut: Reduksi Data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan atau status yang dimiliki oleh seseorang. Pada hakekatnya peran ini juga merupakan suatu rangkaian perilaku yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Kepribadian seseorang juga dapat mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan tersebut akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Sebagaimana dengan Pemerintah Desa Gadobangkong Kabupaten Bandung Barat yang memiliki peran untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kedudukannya, salah satunya untuk membantu serta mengarahkan usaha masyarakat dalam lingkup pembangunan perekonomian agar terus berkembang dan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada peran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam pembangunan perekonomian melalui BUMDes di Desa Gadobangkong secara optimal. Untuk mendalami penelitian tentang “Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Perekonomian Melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Gadobangkong Kabupaten Bandung Barat”, peneliti menggunakan teori menurut Pitana dan Gayatri (2005:96) melalui beberapa dimensi meliputi: motivator, fasilitator, dan dinamisator bahwa Pemerintah Desa memiliki peran untuk mengembangkan unit usaha pada BUMDes dalam pembangunan perekonomian.

Peran motivator tentu dapat dilaksanakan agar segala kegiatan unit usaha dapat berjalan dengan baik. Motivator ini memuat berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk kemudian dilaksanakan oleh pengelola unit usaha. Melalui motivator ini Pemerintah Desa Gadobangkong dalam upaya mengembangkan perekonomian yang ada di Desa Gadobangkong, peneliti dapat memahami lebih mudah bagaimana seharusnya Pemerintah Desa Gadobangkong dalam menjalankan perannya.

Dengan hal ini tentunya Pemerintah Desa mempunyai sebuah program atau kegiatan yang dapat mempertahankan kegiatan unit usaha yang terus berjalan secara maksimal serta dapat menanggulangi permasalahan yang ada terkait pembangunan perekonomian dengan tata kelola unit usaha yang ada pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam

suatu program dan kegiatan tersebut peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gadobangkong di implementasi melalui program pelatihan. Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan bahwa masih minimnya informasi terkait penjelasan tentang Badan Usaha Milik Desa serta unit usaha yang ada didalamnya.

Pemerintah pada umumnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah memberikan pelayanan dan fasilitas bagi masyarakat, baik fasilitas umum maupun fasilitas khusus, begitupun dalam penyediaan fasilitas dalam pembangunan perekonomian. Peran Pemerintah Desa sebagai fasilitator dalam hal ini Pemerintah Desa merupakan peran yang dapat memberikan fasilitas untuk mengembangkan potesni unit usaha pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Fasilitas yang mendukung program pembangunan perekonomian melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diadakan oleh Pemerintah Desa yakni seperti sarana dan prasarana yang diperlukan serta aksesibilitas yang dapat menunjang dan adanya monitoring terkait program-program untuk mengembangkan pembangunan perekonomian di Desa Gadobangkong.

Pemerintah Desa Gadobangkong Kabupaten Bandung Barat mengadakan monitoring dan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang berupa pendanaan DAK (Dana Alokasi Khusus) yang salah satunya untuk mendanai pengadaan pelatihan-pelatihan dan fasilitas yang maksimal untuk diberikan oleh Pemerintah Desa Gadobangkong terhadap masyarakat dengan tujuan mengembangkan potensi peningkatan perekonomian di Desa Gadobangkong.

Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan. Hal tersebut dikarenakan pemerintah sebagai yang memiliki peran untuk mensinergikan berbagai pihak terkait, agar diantaranya tercipta suatu simbiosis mutualisme demi perkembangan perekonomian di Desa Gadobangkong. Dalam mengembangkan pembangunan perekonomian di Desa Gadobangkong melalui Badan Usaha

Milik Desa (BUMDes), sudah dipastikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak bisa berjalan sendiri untuk mengembangkan program-program usahanya tersebut, sehingga mau tidak mau memang harus membangun sinergitas antar stakeholder yang ada. Partisipasi masyarakat dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu modal utama yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan unit usaha di Desa Gadobangkong. Pemerintah Desa Gadobangkong dalam rangka menjalankan peran dinamisator salah satunya yaitu melakukan monitoring terhadap unit usaha yang dibangun dan perkembangan program-program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Perekonomian melalui Badan Usaha Milik Desa Di Desa Gadobangkong Kabupaten Bandung Barat, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran Pemerintah Desa dalam penelitian dirasa harus meningkatkan optimalisasi dalam pembangunan perekonomian melalui BUMDes yang ditinjau melalui pendekatan sebagai berikut. Peran Pemerintah Desa Gadobangkong dalam memberikan motivasi sudah berjalan, namun harus berjalan lebih efektif dan maksimal dalam dorongan yang diberikan untuk pengelolaan terkait unit usaha dalam Badan Usaha Milik Desa di Desa Gadobangkong. Meninjau dari kurang optimalnya dorongan yang diberikan oleh Pemerintah Desa, maka sama halnya untuk fasilitas yang diberikan harus maksimal dan mendukung bagi pengelolaannya. Pelaksanaan pengelolaan unit usaha pada BUMDes harus berjalan maksimal dengan fasilitas yang terpenuhi. Pengelola tersebut harus terarah terkait usaha yang dijalankan atau tidak terkelola dengan baik, meninjau hubungan antara Pemerintah Desa, BUMDes, dan masyarakat. Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Tokoh Masyarakat untuk bersama-sama menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menjalankan unit usaha pada BUMDes dengan baik. Di sisi lain, Pemerintah Desa harus memperhatikan dan teliti terkait hubungan

sinergitas yang dibangun. Sinergitas antar pihak harus terbangun secara efisien, sehingga masyarakat mendapatkan informasi terkait pelaksanaan program-program Badan Usaha Milik Desa di Desa Gadobangkong.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, S. (2000). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chintary, V. Q., & Lestari, A. W. (2016). Peran Pemerintah Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi*, 5(2), 59-63.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). (2007). *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Koentjaraningrat. (2015). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Saputra, D., 2020. Pengembangan Kampung Wisata Berbasis Masyarakat. *Government Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 13, pp. 87-92.





